IMPLEMENTASI REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA DPRD SOLOK SELATAN MASA JABATAN 2024-2029 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI BIDANG PEMBANGUNAN

Harpi Ibranaldi[1], Lince Magriasti[2]

[1,2]*Universitas Negri Padang*
E-mail : harpiibranaldi@gmail.com[1], lincemagriasti@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Studi ini mengkaji sejauh mana anggota DPRD Solok Selatan periode 2024–2029 mewakili aspirasi masyarakat (representasi substantif) dalam fungsi legislasi serta perencanaan pembangunan daerah. Lewat pendekatan kualitatif, membedah dinamika sosial serta politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan di tingkat daerah.Temuan menunjukkan bahwa DPRD Solok Selatan telah terlibat aktif dalam pembahasan RPJMD melalui rapat pleno, Pansus, dan pandangan fraksi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana anggota DPRD mengadvokasi aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta studi dokumentasi peraturan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Keterlibatan ini membuktikan komitmen DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, tak sekadar pemenuhan tugas administratif. Meski demikian, DPRD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan pandangan politik antar fraksi, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan sumber daya. Hambatan ini kerap memperlambat proses pengambilan keputusan.DPRD Solok Selatan terbukti mengambil peran aktif dalam pembahasan RPJMD lewat berbagai mekanisme legislatif, seperti rapat pleno, pembentukan Pansus, dan artikulasi pandangan fraksi. Langkah ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran diarahkan untuk mengintegrasikan kebutuhan riil masyarakat ke dalam kebijakan daerah, melampaui rutinitas birokrasi belaka. Namun, efektivitas proses ini masih dibayangi oleh ego sektoral politik, hambatan birokrasi, dan keterbatasan resources yang kerap memperlambat legitimasi regulasi. Pada akhirnya, riset ini menegaskan adanya ikhtiar nyata dari DPRD dalam memperjuangkan hak-hak publik. Evaluasi mendalam serta solusi atas kendala yang ada sangat mendesak dilakukan demi mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, sasaran yang presisi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Kata Kunci : *Representasi Substantif, DPRD Solok Selatan, Fungsi Legislas*

PENDAHULUAN

Demokrasi meniscayakan rakyat dalam pemegang kekuasaan tertinggi, di mana peran tersebut diwakilkan kepada lembaga legislatif untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat. Khusus di daerah, peran krusial ini berada di pundak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih dari sekadar pembuat aturan, DPRD adalah ruang dengar dan penyambung lidah masyarakat dalam gerak roda pemerintahan. Salah satu pilar utamanya adalah fungsi legislasi, yakni merancang Peraturan Daerah (Perda) bersama pemerintah setempat. Lebih dari sekadar pemenuhan dokumen formal, setiap Perda yang lahir haruslah menjadi kompas kebijakan yang solutif, menjawab tantangan keseharian, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD menetapkan arah pembangunan daerah melalui produk hukum utama, di antaranya:Perda RTRW: Mengatur tata guna lahan yang menetapkan zonasi industri, pemukiman, serta kawasan hijau pelestarian alam.Perda RPJPD/RPJMD: Menjadi dokumen hukum wajib yang memuat visi, misi, dan arah strategis pembangunan daerah untuk periode 5 sampai 20 tahun mendatang.

Lewat fungsi legislasinya, DPRD memegang peran esensial sebagai arsitek regulasi lokal yang mengarahkan arah pembangunan daerah. Bersama kepala daerah, DPRD merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang memastikan setiap langkah pembangunan—baik infrastruktur maupun sumber daya manusia—berpayung hukum kuat, berkeadilan, dan sepenuhnya sejalan dengan denyut nadi serta aspirasi masyarakat

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD masih kerap tersendat. Penyusunan kebijakan sering kali lebih didominasi oleh inisiatif pemerintah daerah, sementara suara rakyat yang dititipkan melalui DPRD belum tersampaikan secara maksimal. Tantangan ini semakin kompleks akibat adanya sekat kepentingan politik, minimnya empati terhadap persoalan akar rumput, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Karena itu, kinerja DPRD tidak bisa lagi dinilai dari status formalnya saja, melainkan dari aksi nyata mereka di parlemen. Di sinilah pentingnya representasi substantif—sebuah konsep di mana wakil rakyat benar-benar menjadi penyambung lidah masyarakat dalam setiap kebijakan. Representasi substantif menuntut anggota dewan tidak sekadar duduk sebagai pelengkap struktur, tetapi aktif memahami dan memperjuangkan kebutuhan warga agar produk hukum yang lahir benar-benar menjawab masalah nyata di lapangan.

Optimalisasi fungsi legislasi DPRD sering terbentur oleh dominasi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, kesenjangan aspirasi, serta friksi kepentingan politik. Untuk mengatasi hal ini, anggota DPRD dituntut menerapkan representasi substantif. Konsep ini menekankan bahwa wakil rakyat tidak hanya hadir secara formal, tetapi harus proaktif memahami kebutuhan konstituen dan memperjuangkannya ke dalam kebijakan publik.Pada realitasnya, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD masih kerap membentur tembok halangan. Alih-alih proaktif, penyusunan kebijakan justru lebih sering didominasi oleh pemerintah daerah, sementara suara dan aspirasi masyarakat belum tersalurkan secara maksimal lewat DPRD. Ruang kebijakan ini juga sering kali terdistorsi oleh benturan kepentingan politik, minimnya empati terhadap akar masalah warga, serta rendahnya keterlibatan publik. Menghadapi tantangan ini, kita perlu melihat eksistensi DPRD melampaui status formal mereka sebagai wakil rakyat, melainkan dari aksi nyata mereka di lapangan. Di sinilah pentingnya representasi substantif—sebuah konsep di mana anggota dewan tidak sekadar duduk sebagai simbol perwakilan, tetapi aktif memperjuangkan kebutuhan riil rakyat dalam setiap keputusan. Ketika representasi substantif ini bekerja dengan baik, barulah kita bisa

berharap lahirnya kebijakan yang benar-benar menyentuh dan menyelesaikan masalah masyarakat."

DPRD Kabupaten Solok Selatan masa jabatan 2024–2029 memegang peranan sentral dalam merumuskan arah pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi legislasi. Melalui proses pembahasan kebijakan, pembentukan Pansus, dan sinergi eksekutif-legislatif, anggota dewan dituntut untuk benar-benar hadir sebagai representasi rakyat. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi representasi substantif tersebut, guna mengetahui sejauh mana wakil rakyat mampu memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat ke dalam produk hukum dan kebijakan pembangunan daerah. Lewat pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2024–2029 menjadi pilar utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Peran representatif ini dijalankan melalui instrumen strategis seperti rapat paripurna, pembentukan Pansus, dan pembahasan rancangan kebijakan bersama pemerintah daerah. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi representasi substantif anggota DPRD Solok Selatan masa jabatan 2024–2029 pada sektor legislasi pembangunan. Penelitian ini penting untuk memetakan efektivitas para anggota dewan dalam mengawal serta mentransformasikan aspirasi konstituen menjadi kebijakan pembangunan yang berdampak luas."

METODE

Memakai metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan sebagai representasi masyarakat dalam fungsi legislasi pembangunan. Lokasi penelitian ini berpusat di Kantor DPRD Kabupaten Solok Selatan, menimbang posisi strategis lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan daerah. Lebih lanjut, fokus utama penelitian ini adalah analisis representasi substantif, yang mencakup kemampuan anggota dewan dalam menampung, mengawal, dan merealisasikan aspirasi publik ke dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini memakai wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan bersama anggota DPRD, pihak sekretariat DPRD, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi faktual mengenai proses pembahasan kebijakan, keterlibatan legislatif, serta upaya dewan dalam memperjuangkan kepentingan publik. Data tersebut diperkuat lewat dokumen-dokumen rapat, peraturan daerah, dan hasil pembahasan DPRD terkait proses legislasi dan pembangunan daerah. Analisis data dilakukan melalui langkah pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Melalui serangkaian tahapan ini, peneliti memaparkan implementasi representasi substantif DPRD Kabupaten Solok Selatan serta menilai sejauh mana aspirasi masyarakat terwujud dalam kebijakan pembangunan.Pengumpulan data dalam penelitian ini mengombinasikan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Proses wawancara melibatkan anggota DPRD, pihak sekretariat, serta pemangku kepentingan terkait guna membedah proses legislasi, tingkat keterlibatan aktor, atau upaya memperjuangkan hak publik. Informasi hasil wawancara tersebut kemudian divalidasi serta dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti regulasi daerah dan dokumen hasil rapat kerja. Data yang diperoleh diolah secara sitematis lewat reduksi, kategorisasi, display data, hingga verifikasi akhir. Melalui rangkaian metodologi ini, penelitian secara mendalam menguraikan perwujudan representasi substantif anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Bidang Pembangunan

Hasil penelitian menunjukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2024–2029 mengambil peran penting dalam fungsi legislasi dan pembahasan kebijakan pembangunan. DPRD terlibat aktif mulai dari tahap awal perumusan hingga persetujuan akhir bersama pemerintah daerah. Melalui berbagai instrumen seperti rapat paripurna, pembentukan Pansus, serta pembahasan bersama OPD, anggota DPRD secara konsisten memberikan kritik, saran, serta pandangan umum. Hingga demikian, DPRD menjalankan fungsinya tak sekadar sebagai lembaga formal, melainkan sebagai aktor utama yang aktif menyempurnakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan ini berjalan linear dari hulu ke hilir—sejak pembahasan awal naskah akademis hingga tahap ketok palu bersama pemerintah daerah. DPRD membuktikan perannya bukan sekadar fungsi administratif pelengkap, melainkan mitra kritis pemerintah yang aktif menyempurnakan arah kebijakan daerah.Proses bertahap mulai dari pemaparan pandangan umum fraksi, kerja mendalam Panitia Khusus (Pansus), hingga evaluasi laporan hasil kerja, merupakan panggung bagi DPRD untuk menjalankan fungsi check and balances. Keterlibatan aktif anggota dewan dalam memberikan catatan kritis memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan lahir dari proses uji publik yang matang, bukan sekadar penerimaan pasif atas rancangan pemerintah daerah."

Keikutsertaan anggota DPRD lewat rapat pembahasan RPJMD mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan dalam kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan ini memastikan setiap aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik. Dalam mengukur tingkat partisipasi tersebut, berikut adalah rincian data yang dihimpun dari dokumen risalah rapat.

Tabel 1. Keterlibatan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Bidang Pembangunan

Urutan Rapat	Keaktifan anggota DPRD	Fraksi	Keterangan
1	Afrizal Chandra, S.H. Jordi Nasco Vandanu, S.H. Sarius Noveri Dodi Nofrial, S.T. Martius Roni Ismaji	Golkar	jumlah 8 anggota DPRD fraksi golkar yang ikut serta dalam rapat 6 anggota dan 2 lainnya izin
2	Ari Hendratno, A.Md.Ak. Marcos	FPS	jumlah 3 anggota DPRD Fraksi FPS yang ikut serta dalam rapat 2 dana 1 lainnya izin
3	Afrizal Chandra, S.H. Jordi Nasco Vandanu, S.H. Sarius Noveri Dodi Nofrial, S.T Roni Ismaji	Golkar	jumlah 8 anggota DPRD fraksi golkar yang ikut serta dalam rapat 6 anggota dan 2 lainnya izin sakit

	Martius		
4	Andri Yosan, S.S. Aprisal Indra Sari Putra H. Mursiwal, S.H.	NasDeM	Semua anggota Fraksi nasdem ikut serta dalam rapat
5	Kalmaidi (Kaloho) Ronal Syahjohan David Taster, S.Sos.	Gerindra	Semua anggota fraksi gerindra ikut serta dalam rapat
6	Ari Hendratno, A.Md.Ak.	FKS	jumlah 3 anggota DPRD fraksi FPS yang ikut serta dalam rapat 1 anggota dan 2 lainnya izin
7	Dede Pasarela, A.Md. Albert Arifin	Demokrat	jumlah 3 anggota DPRD fraksi Demokrat yang ikut serta dalam rapat 2 anggota dan 1 lainnya izin
8	Daliyus Sultan Alif Baloen, Tuanku Mudo Baloen	FKAP	jumlah 4 anggota DPRD fraksi FKAP yang ikut serta dalam rapat 2 anggota dan 2 lainnya izin

Sumber : Dokumen risalah rapat DPRD tahun 2025

Sesuai data keikutsertaan dalam tabel, anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan lintas fraksi berperan aktif dalam pembahasan RPJMD 2025–2029. Hal ini ditegaskan bahwa fungsi legislasi berjalan efektif melalui kontribusi saran serta pandangan yang konstruktif di setiap tahapan pembangunan daerah.

Implementasi Representasi Substantif Anggota DPRD dalam Menyerap dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Implementasi representasi substantif anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan diwujudkan lewat pengawalan aspirasi publik secara nyata dalam penyusunan kebijakan daerah. Anggota dewan bergerak melampaui fungsi administratif penerimaan usulan dengan memastikan setiap aspirasi berbobot dalam pembahasan pembangunan. Data aspirasi tersebut dihimpun secara langsung melalui agenda reses, kunjungan daerah pemilihan, serta dialog interaktif bersama tokoh masyarakat dan berbagai kelompok lokal. Lewat interaksi ini, potret persoalan mendasar di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat teridentifikasi. Suara rakyat sebagai kompas: "Melalui representasi substantif, anggota DPRD Kabupaten menjadikan keluh kesah masyarakat sebagai kompas utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Menjembatani harapan: Anggota DPRD yang amanah tidak hanya mendengarkan saat reses, tetapi aktif mengawal setiap harapan warga hingga menjadi program nyata yang menyentuh akar rumput. Mendengar dan bertindak: Representasi substantif adalah janji untuk tidak hanya menjadi perpanjangan tangan partai, tetapi menjadi pengeras suara bagi masyarakat yang membutuhkan

keadilan. Masukan yang terjaring kemudian ditransformasikan menjadi basis pertimbangan kebijakan, sehingga keputusan daerah tidak bersifat top-down melainkan berorientasi pada kebutuhan riil. Pendekatan ini menegaskan fungsi representasi yang berorientasi pada asas kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Solok Selatan.

Peran DPRD sebagai Lembaga Perwakilan

Lebih dari sekadar perumus peraturan, DPRD Kabupaten Solok Selatan hadir sebagai penyambung lidah masyarakat. Lewat dialog langsung di lapangan dan diskusi bersama tokoh warga, setiap keluhan mulai dari masalah pertanian hingga kesehatan diserap untuk diperjuangkan dalam kebijakan daerah. Hal ini dibuktikan bahwa keberhasilan pembangunan Solok Selatan lahir dari kemampuan DPRD dalam memastikan suara rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.DPRD merupakan pilar utama representasi rakyat yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah. Fungsi mereka mencakup pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik. Temuan penelitian di Kabupaten Solok Selatan mengonfirmasi bahwa anggota DPRD secara proaktif menjalin komunikasi di luar ruang rapat resmi, seperti melalui dialog langsung serta kunjungan lapangan. Informasi terkait persoalan nyata masyarakat, seperti infrastruktur dan ekonomi, konsistensi diserap serta diolah menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Dengan demikian, DPRD terbukti menjalankan peran gandanya: tak sekadar sebagai pembentuk kebijakan, melainkan juga komunikator utama yang memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD hadir bukan sekadar sebagai pembuat aturan atau penyetuju dana, melainkan sebagai benteng pertahanan bagi hak-hak seluruh masyarakat daerah.Konstitusi telah membekali DPRD dengan tiga mandat utama—membentuk hukum, mengelola anggaran, serta mengawasi jalannya roda pemerintahan—semuanya demi satu muara: kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Mekanisme Penyerapan Aspirasi sebagai Bentuk Representasi Substantif

Penelitian menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan representasi substantif. Lewat proses ini, anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dapat memetakan kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi warga. Aspirasi tersebut digali melalui berbagai cara, mulai dari masa reses, kunjungan dapil, musyawarah warga, hingga diskusi intim bersama tokoh adat, agama, pemuda, kelompok tani, dan ormas. Pendekatan ini memberi ruang luas bagi warga untuk mengutarakan keluhan serta harapan pembangunan mereka. Dampaknya, para wakil rakyat mendapatkan gambaran lapangan yang lebih jernih dan objektif, melampaui sekadar laporan di atas kertas dari pemda. Kegiatan ini juga memperkuat kedekatan personal antara DPRD dan konstituennya, yang memicu keterbukaan warga dalam mengadu. Hingga demikian, penyerapan aspirasi bertransformasi dari sekadar kewajiban hukum menjadi kunci utama lahirnya kebijakan yang prorakyat.Optimalisasi mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat merupakan pilar utama representasi substantif, yang menjamin setiap arah kebijakan pemerintah berakar kuat dari kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.

Menjadi wakil rakyat bukan tentang seberapa sering kita duduk di kursi parlemen, melainkan tentang seberapa jauh kita membawa suara rakyat ke dalam ruang kebijakan.Menyerap aspirasi ialah jembatan moral yang mengubah janji politik menjadi aksi nyata, itulah wujud sejati dari representasi substantif.Kita tidak sedang sekadar mendengarkan keluhan, kita sedang merajut kedaulatan rakyat menjadi produk hukum yang berkeadilan lewat representasi yang substantif.Mekanisme penyerapan aspirasi bukan sekadar rutinitas prosedural, melainkan

instrumen vital dalam mewujudkan representasi substantif yang berorientasi pada kepentingan riil konstituen.Melalui penyerapan aspirasi yang sistematis, lembaga perwakilan dapat mentransformasikan suara publik menjadi kebijakan nyata yang mencerminkan esensi dari representasi substantif.Representasi substantif hanya bisa dicapai secara optimal ketika mekanisme penyerapan aspirasi berfungsi sebagai jembatan dialektis antara kebutuhan empiris masyarakat dan produk legislasi.

Aspirasi Masyarakat sebagai Dasar dalam Pembahasan Kebijakan Pembangunan

Anggota DPRD mengemban amanat representasi substantif tidak sekadar menampung seluruh aspirasi masyarakat, melainkan mengolahnya secara selektif. Lewat proses pembahasan bersama pemerintah daerah, setiap usulan diuji berdasarkan urgensi, aturan yang berlaku, serta kemampuan anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan publik tetap menjadi prioritas utama yang diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang realistis serta aplikatif.Anggota DPRD terus bergerak menghimpun aspirasi warga modal utama pembangunan daerah. Hingga demikian, tak semua usulan bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses penyaringan ketat yang melihat aspek hukum, prioritas daerah, kondisi sosial, hingga kemampuan anggaran negara. Suara rakyat bukanlah sekadar pelengkap ornamen, melainkan kompas arah pembangunan bangsa. Membangun daerah tanpa mendengar warganya adalah ibarat berlayar di malam hari tanpa peta serta kompas.Pembangunan sejati tidak diturunkan dari atas, melainkan tumbuh subur dari akar rumput aspirasi masyarakat.Ketika aspirasi warga menjadi dasar kebijakan, maka setiap bata yang dipasang adalah perwujudan dari harapan mereka.

Di sinilah peran penting legislator dalam memilah dan menyelaraskan usulan agar kebijakan yang lahir benar-benar membumi. Lewat pembahasan bersama pemda, DPRD menyuarakan fakta lapangan demi mengawal kebutuhan rakyat. Pada akhirnya, representasi substantif sejati bukanlah menyetujui semua tuntutan, melainkan meramu aspirasi menjadi kebijakan nyata yang mendatangkan manfaat luas. Sebagai wakil rakyat, tugas DPRD bersama pemerintah daerah bukan hanya menerima semua aspirasi, melainkan mengolahnya dengan bijak. Proses inilah yang disebut representasi substantif—memadukan kebutuhan warga di lapangan dengan kebijakan yang realistis agar pembangunan benar-benar tepat sasaran serta berdaya guna. Pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran berakar dari aspirasi masyarakat, di mana suara rakyat menjadi kompas utama dalam merumuskan setiap kebijakan publik.""Menempatkan aspirasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan adalah wujud nyata dari demokrasi partisipatif, memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dan realitas di lapangan.

Perjuangan Anggota DPRD dalam Mengawal Kepentingan Masyarakat

Representasi substantif anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan melampaui tahap penyerapan aspirasi; ia mewujud nyata dalam perjuangan gigih selama pembahasan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, anggota dewan konsisten membawa usulan warga ke forum bersama pemerintah daerah, serta memperjuangkannya lewat argumen yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Tidak sekadar menyampaikan suara konstituen, mereka juga berperan penjembatan yang meyakinkan pemangku kepentingan sembari menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada kemaslahatan publik secara luas. Komitmen utuh dalam mengawal aspirasi dari hulu ke hilir inilah yang memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Mereka melampaui tugas normatif penyerapan aspirasi dengan aktif berdebat, memberikan masukan konkret, serta meyakinkan pengambil kebijakan tentang urgensi kebutuhan warga. Pengawalan ketat dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan ini memastikan bahwa produk hukum yang lahir benar-benar berorientasi pada kesejahteraan publik.

Keberhasilan representasi substantif DPRD Kabupaten Solok Selatan dibuktikan melalui pengawalan ketat terhadap aspirasi berbasis fakta lapangan. Lewat argumentasi yang kuat dan pertimbangan asas keadilan, mereka memastikan kebijakan yang diputuskan benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dedikasi anggota DPRD dibuktikan melalui fungsi pengawasan yang konsisten, memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar berpihak serta menyentuh hajat hidup orang banyak. Perjuangan mengawal kepentingan masyarakat menuntut keberanian, ketulusan, dan sinergi agar aspirasi akar rumput diterjemahkan menjadi pembangunan yang merata. Lembaga legislatif daerah adalah garda terdepan dalam menjaga keadilan sosial, tempat setiap keluhan masyarakat diubah menjadi solusi nyata melalui pengawalan anggaran yang transparan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2024–2029 sudah berhasil mengoptimalkan perannya sebagai representasi rakyat. Hal ini tercermin dari keaktifan mereka mengawal setiap tahapan penyusunan kebijakan, di mana seluruh masukan dari konstituen di daerah pemilihan secara konsisten diintegrasikan demi terciptanya pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa legislasi tak sekadar formalitas hukum, melainkan upaya memastikan kebijakan berpihak pada rakyat. Dengan mengintegrasikan kondisi riil daerah pemilihan ke dalam pembahasan, DPRD menghasilkan produk hukum yang kontekstual dan solutif.

Pelaksanaan representasi substantif dipenelitian ini tercermin dari peran aktif anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai instrumen, seperti reses dan komunikasi langsung, untuk dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Walaupun demikian, penerjemahan aspirasi ke dalam kebijakan daerah tak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kerangka regulasi, skala prioritas, dan kapasitas fiskal. Lebih lanjut, proses pembahasan kebijakan sering kali menghadapi tantangan teknis maupun perbedaan pandangan politik di antara anggota dewan. Kendati demikian, dinamika tersebut merupakan keniscayaan dalam iklim demokrasi yang konstruktif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas.Penelitian ini dibuktikan bahwa pelaksanaan representasi substantif berjalan lewat peran aktif anggota DPRD dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi ini terbentuk lewat agenda reses, kunjungan dapil, serta dialog langsung yang hasilnya menjadi input krusial dalam pembahasan kebijakan daerah. Namun, realisasinya tetap bersandar pada koridor hukum, prioritas pembangunan, serta kemampuan fiskal daerah. Di sisi lain, pembahasan kebijakan kerap dihadapkan pada tantangan teknis berupa keterbatasan waktu dan beban materi yang masif, serta tantangan politis berupa perbedaan persepsi antaranggota dewan. Meski begitu, perbedaan pandangan ini hal wajar dalam ekosistem demokrasi demi menghasilkan keputusan yang lebih matang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi substantif diaktualisasikan lewat upaya anggota DPRD dalam menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Aspirasi tersebut dihimpun melalui kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan (dapil), serta interaksi langsung dengan masyarakat, yang kemudian diintegrasikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pembangunan daerah. Kendati demikian, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan akibat batasan regulasi, skala prioritas, dan kapasitas fiskal daerah. Proses artikulasi ini juga diperhadapkan pada tantangan internal seperti keterbatasan waktu, Kompleksitas materi

hukum, serta dinamika perbedaan pandangan antarfraksi. Namun, polarisasi pendapat tersebut dinilai sebagai dialektika demokrasi yang wajar demi melahirkan kebijakan yang lebih akomodatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan berhasil menjalankan fungsi representasi substantif. DPRD sukses menjadi penghubung yang aktif antara rakyat dan pemerintah, hingga memastikan bahwa tiap proses legislasi benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Keberadaan DPRD sangat berguna untuk mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang partisipatif, akurat sasaran, serta bermanfaat bagi kesejahteraan daerah.Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan telah mengoptimalkan fungsi representasi substantif dengan mengartikulasikan aspirasi publik ke dalam proses legislasi. Sebagai agregator kepentingan, DPRD tak sekadar memproduksi peraturan daerah, melainkan berfungsi sebagai jembatan strategis antara masyarakat serta pemerintah daerah. Sinergi ini krusial untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, akurat, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Solok Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif.

Kurniawan, H. (2022). Implementasi fungsi representasi dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pitkin, H. F. (1972). The concept of representation (1st ed.). University of California Press.

Religia, A. M. (2015). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.

Saward, M. (2006). The Representative Claim. Contemporary Politocal Theory, 5, 297–318. https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300234 di akses tanggal 15 juni 2026

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In Bandung: Alfabeta (Vol. 3). Suwanda, D. (n.d.). Peningkatan Fungsi DPRD (P. R. R. Bandung (ed.)).

Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas. IPDN PRESS.

Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. OUP Oxford.

Ahmad Redin SH. 2021 Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Sinar Gratifika

Budiardjo, M. (2003). Dasar Dasar ilmu Plitik. Gramedia pustaka utama

Creswel, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Karso, A. J. (2026).Wacana Pilkada via DPRD: antara Efesiensi & Konstitusi. CV Eureka Media Aksar . Media Aksara.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 56.

Handrie, K. (2026). Implementasi Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara).

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. . Solok Selatan: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Religia, A. M. (2016).Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).